

**ANALISIS RASIO AKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN UNTUK
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Safira Dita Permatasari

NPM : 1405170472

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : SAFIRA DITA PERMATASARI
NPM : 1405170472
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO AKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN
UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PENGUJI I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

TIM PENGUJI

PENGUJI II

(HENNY TRIASTUTY, SE, M.Si)

Pembimbing

(NOVI FADHILA SE, MM)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(JANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SAFIRA DITA PERMATASARI
N.P.M : 1405170472
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO AKTIVITAS DAN RASIO
PERTUMBUHAN UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN
2012-2016

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(NOVI FADHILA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Safira Dita Permatasari

Npm : 1405170472

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan
Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Medan Tahun 2012-2016

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Kantor Walikota Medan.** dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat pernyataan



Safira Dita Permatasari

ABSTRAK

Safira Dita Permatasari. 1405170472. Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016. 2018. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah kota medan jika diukur menggunakan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan data sekunder. Penulis menggunakan teknik analisis data yang berupa data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa terjadi penurunan dari hasil perhitungan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Diketahui bahwa pemerintah kota medan lebih memprioritaskan belanja rutin ketimbang belanja pembangunan setiap tahunnya dengan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa belanja pembangunan jauh dibawah standar yang telah ditetapkan serta dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah dikatakan belum baik karena belum mampu mengontrol aggaran belanja yang dikeluarkan setiap tahun. Sedangkan rasio pertumbuhan menunjukkan terjadi penurunan yang menandakan pemerintah kota medan belum mampu mempertahankan ataupun meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari tahun anggaran 2012 hingga tahun 2016. Untuk meningkatkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan pada pemerintah kota medan dapat dilakukan dengan cara menekan anggaran belanja rutin setiap tahunnya sesuai atau mendekati realisasi yang telah ditentukan dan berusaha mempertahankan pendapatan asli daerahnya yang diterima dari pemerintah pusat sehingga tidak terjadi defisit ditahun berikutnya.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Kota Medan, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti berupa kesehatan dan keselamatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat serta teriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam bagi dunia dan penghuninya. Skripsi ini dibuat berdasarkan apa yang penulis teliti di tempat riset, yang beralamatkan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan. Mulai Bulan Desember 2017 s/d Maret 2018.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menemukan kesulitan dan hambatan, baik dilapangan maupun pembahasannya. Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Orangtua tercinta yaitu Ibunda Rita Ariani Siregar dan Ayahanda (Alm) Suhariadi yang tanpa letih memberikan dukungan baik moral maupun material, kasih sayang, perhatian, dan doa yang tak ternilai harganya sehingga peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Namun kesulitan dan hambatan juga dapat ditanggulangi berkat bantuan dari segala pihak ataupun pihak yang turut berpartisipasi. Maka peneliti mengungkapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

2. Bapak Januri SE.,MM.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
3. Ibu Fitriani Saragih SE.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
4. Ibu Zulia Hanum SE.,M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
5. Ibu Novi Fadhila SE.,MM, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan ataupun arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Henny Zurika Lubis selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada peneliti.
7. Seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, yang telah membekali begitu banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Teman-teman tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Medan, Maret 2018

Peneliti,

SAFIRA DITA

PERMATASARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Laporan Keuangan	7
B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	8
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
D. Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Berfikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Pendekatan Penelitian.....	18
B. Definisi Operasional Variabel	18
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Teknik Analisis Data.....	20

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Hasil Penelitian.....	21
1. Deskripsi Objek Penelitian	21
2. Deskripsi Data.....	23
B. Pembahasan	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang

dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut member keleluasaan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sendiri diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Kota Medan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun APBD dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur hal tersebut peneliti menggunakan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016 ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	PENDAPATAN	2.998.203.912.475,38	3.276.344.285.159,73	4.042.115.828.231,62	4.259.044.490.715,42	4.308.116.916.024
1	Pendapatan Asli Daerah	1.147.901.461.607,38	1.206.169.709.147,73	1.384.246.114.729,62	1.489.723.189.088,60	1.535.309.574.014
2	Pendapatan Transfer	1.822.682.350.868,00	2.060.845.776.012,00	2.657.869.713.502,00	2.769.321.301.626,82	2.772.807.342.010
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	27.620.100.000,00	9.328.800.000,00	0,00	0,00	
B	BELANJA	3.021.172.391.041,67	3.224.449.048.408,88	3.723.643.299.085,60	4.373.738.285.236,94	4.523.672.134.655
1	Belanja Operasi	2.462.668.653.257,67	2.593.084.833.763,88	2.939.241.615.113,97	3.456.571.285.912,16	3.584.201.617.240
2	Belanja Modal	558.428.737.784,00	630.802.958.785,00	783.883.177.721,63	916.888.037.907,78	936.599.131.961
3	Belanja Tak Terduga	75.000.000,00	561.255.860,00	518.506.250,00	278.961.417,00	2.871.385.453
	Surplus/ (Defisit)	(22.968.478.566,29)	51.895.236.750,85	318.472.529.146,02	(115.923.783.421,52)	(217.114.414.970,

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi defisit atau kekurangan kas keuangan pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 dan 2014 telah stabil kembali, tetapi pada tahun 2015 terjadi defisit yang cukup besar dan terus meningkat pada tahun selanjutnya. Surplus atau Defisit merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, apabila lebih besar realisasi pendapatan daripada realisasi belanja maka akan terjadi surplus dan begitu pula sebaliknya apabila lebih besar realisasi belanja daripada realisasi pendapatan maka akan terjadi defisit seperti pada tabel diatas. Pada tabel laporan realisasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Oleh karena itu peneliti ingin mengukur kinerja pemerintah dengan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan, dimana rasio aktivitas untuk mengukur bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya

pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal dan rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai apabila surplus, namun pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi defisit. Sedangkan menurut Bayu Sulistianoro (2013) defisit anggaran sengaja digunakan untuk alat stabilisasi ekonomi, umumnya pemerintah lebih memilih melebarkan defisit agar APBN dapat memiliki daya ungkit terhadap perekonomian dan penyerapan anggaran yang tinggi akan menjadi asumsi bahwa APBN bekerja dengan baik. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin meneliti tentang Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya Defisit yang terus meningkat dimulai dari tahun 2015 hingga 2016.

C. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Pemerintah Kota Medan jika diukur dengan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan?

2. Apakah Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan sudah memenuhi standar?
3. Bagaimana Cara meningkatkan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kota Medan jika diukur dengan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.
2. Untuk mengetahui apakah Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan sudah memenuhi Standar.
3. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta untuk menambah pengetahuan tentang kinerja Pemerintah Kota Medan.
2. Sebagai tambahan literature akademis dalam pengembangan praktek akuntansi pemerintahan terutama tentang sistem akuntansi keuangan

daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Bastian (2013) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Noordiawan (2012) secara spesifik menyatakan tujuan laporan keuangan pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sementara itu Mardiasmo (2013:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat

otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21 menyatakan, bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran

tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja (performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indicator keuangan dan nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Mardiasmo (2012) "Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial". Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi atau instansi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda kinerja yang merosot. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional. Penilaian Kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja instansi tersebut.

D. Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan

Menurut Sutrisno (2014) rasio keuangan adalah laporan keuangan yang merupakan cermin dari prestasi perusahaan / instansi pada suatu periode

tertentu. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan atau instansi kita dapat mengetahui bagaimana prestasi terbaru instansi tersebut.

1. Rasio Aktivitas

Secara umum aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik dalam belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (modal). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio aktivitas (keserasian) dapat dirumuskan :

$$\text{Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

2. Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Diketuinya tingkat pertumbuhan maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun dihitung} - \text{PAD Tahun Sebelumnya}}{\text{PAD Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun Dihitung} - \text{Pendapatan Tahun Sebelumnya}}{\text{Pendapatan Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Tahun Dihitung} - \text{Belanja Tahun Sebelumnya}}{\text{Belanja Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
Aditya Maulana Putra / 2014	Analisis Rasio Pertumbuhan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 2008-2012	Rasio Pertumbuhan kabupeten Klaten dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah secara umum mengalami peningkatan kinerja keuangan pendapatan.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma
Bulan Susanti / 2010	Analisis Rasio Aktivitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah	Kinerja tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh Rasio Aktivitas. ketergantungan	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

	Provinsi NTB Tahun Anggaran 2003-2007	keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang.	
Muhammad Saputra / 2016	Analisis Rasio Pertumbuhan dan Kemandirian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014	Varian / selisih pendapatan baik, rasio pertumbuhan sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dan pemerintah telah efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Negara
Sagay Arsajaya / 2013	Analisis Rasio Aktivitas dan Pertumbuhan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2009-2011	Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik. Dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengelola anggaran belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Global Amurang
Nurhayati / 2015	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Rokan Hulu sudah tergolong sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bisa meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan lain-lainnya setiap	Jurnal Ilmiah Cano Economos Vol. 4 Nomor 1

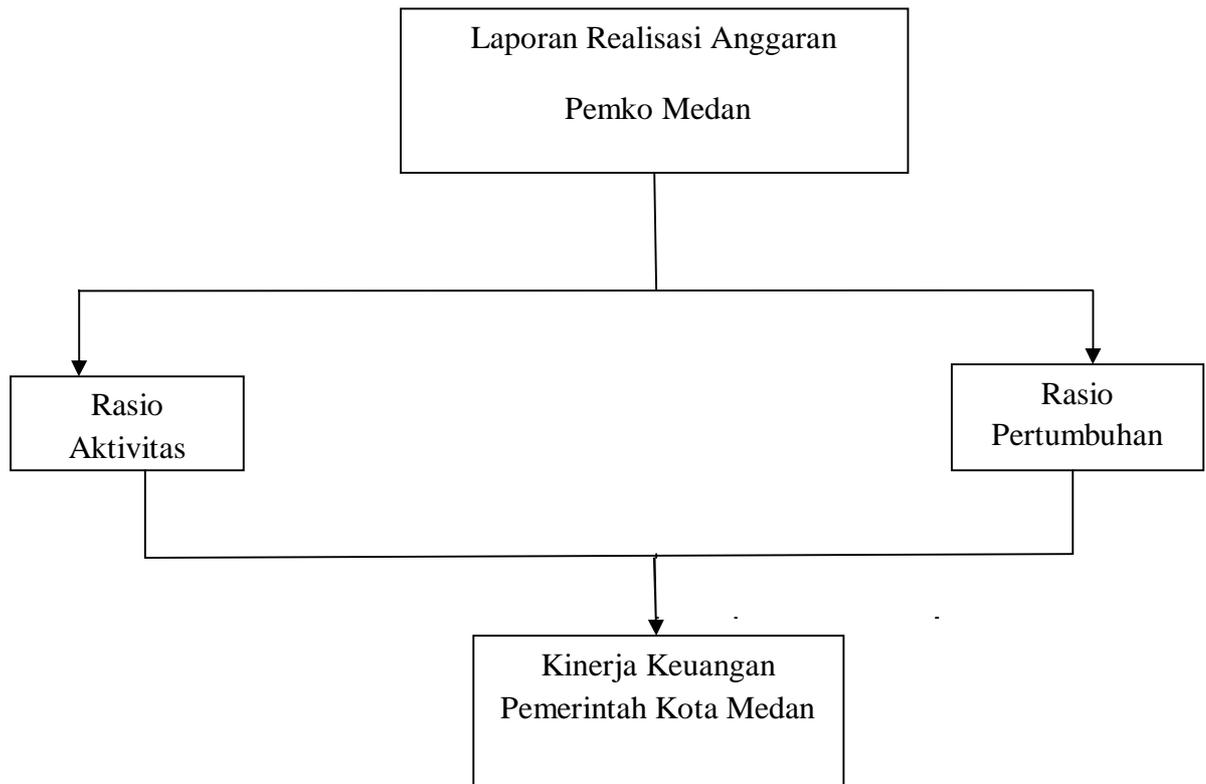
		tahun dan menyeimbangkan antara pendapatan yang di terima dengan belanja yang dikeluarkan setiap tahunnya.	
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu untuk penelitian penelitian diatas dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2016 dimana tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki anggaran pendapatan yang berbeda dan anggaran belanja daerah yang berbeda-beda. Apabila anggaran pendapatan dan belanjanya berbeda maka berbeda pula hasil perhitungan dan kinerja keuangan dari pemerintah daerah tersebut. Variabel yang digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu juga berbeda-beda, Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah peneliti terdahulu menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Hasil yang diperoleh tiap-tiap daerah juga berbeda tergantung dengan kemandirian daerah tersebut dalam mengelola pendapatan yang diterimanya serta kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya setiap tahun. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin meneliti bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah kota medan saat ini apakah dapat dikatakan baik atau belum baik.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Dimana peneliti datang ke Kantor Walikota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 02 Medan. Kemudian peneliti menemui pengelola data keuangan Pemerintah Kota Medan yaitu pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa Laporan Realisasi Anggaran untuk melihat informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa Laporan Realisasi Anggaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. Peneliti ingin mengetahui apakah pendapatan daerah pemerintah kota medan meningkat setiap tahunnya atau justru mengalami penurunan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Data-data yang telah terkumpul tersebut kemudian dihitung dan disesuaikan dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Jika hasil menunjukkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan maka akan dikategorikan baik namun apabila belum memenuhi standar ataupun masih jauh dengan standar yang telah ditetapkan maka tergolong belum baik. Data-data tersebut akan di analisis menggunakan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menguraikan kalimat-kalimat penjelasan guna menyampaikan informasi yang diinginkan peneliti. Kuantitatif merupakan penelitian yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk standar.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel ini yaitu :

1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas instansi atau perusahaan dalam menentukan prioritas belanja anggarannya. Dari hasil perhitungan rasio ini dapat diketahui apakah pemerintah kota medan memprioritaskan anggaran belanjanya kepada belanja rutin atau belanja pembangunan.

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang akan diteliti atau selama beberapa periode anggaran bisa mempertahankan pendapatan yang diterima atau

meningkatkan pendapatannya sehingga mengalami pertumbuhan pendapatan serta memiliki kinerja yang positif.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Medan yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 02 Medan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai saat ini yaitu bulan Maret 2018.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun/Bulan															
		Des'17				Jan'18				Feb'18				Mar '18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Proposal Pengajuan Judul																
2.	Riset																
3.	Penyusunan Proposal																
4.	Bimbingan Proposal																
5.	Seminar Proposal																
6.	Bimbingan Skripsi																
7.	Sidang Meja Hijau																

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan dua cara yaitu :

1. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang diperoleh dari perusahaan atau instansi pemerintahan seperti sejarah ringkas dan laporan keuangan pemerintah kota medan.

2. Riset Pustaka (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sukmadinata metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena buatan manusia. Dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa catatan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. Langkah-langkah dari metode deskriptif tersebut ialah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. Mengidentifikasi masalah dari data-data yang telah dikumpulkan.

3. Perumusan masalah, yaitu pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data yang telah dikumpulkan.
4. Melakukan analisis, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.
5. Menarik kesimpulan dari penelitian, yaitu menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyimpulkan semua jawaban dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Seiring perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan bagian diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tugas utamanya mengelola keuangan pemerintahan kota medan. Yang sekarang terdiri dari Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pembendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*). Pengembangan dan peningkatan pengelola keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang professional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana perkembangan dan peningktana pengelola keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang professional guna pengawasan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintahan Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan

Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan prosedur pengelola keuangan yang ada.

Kinerja dan peran Aparatur sangat menentukan keberhasilan visi Pemerintahan Kota Medan. Adapun keinginan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik yang didukung dengan kelembagaan perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintahan Kota Medan yang sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur.

2. Deskripsi Data

Penilaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan adalah sebagai berikut :

a. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas merupakan salah satu dari berbagai macam rasio yang melakukan perbandingan antara tingkat pendapatan pada semua aktiva yang dimilikisehingga fungsi akuntansi keuangan bisa berjalan dengan baik. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Berikut diuraikan perhitungan rasio aktivitas berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai beirkut :

$$\text{Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Dengan kriteria : 50% - 100% dikatakan Baik

< 50% dikatakan Tidak Baik

Tabel 4.1

Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Medan

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan	Prioritas
2012	81,5%	18,4%	Belanja Rutin
2013	80,4%	19,5%	Belanja Rutin
2014	78,9%	21,0%	Belanja Rutin
2015	79,0%	20,9%	Belanja Rutin
2016	79,2%	20,7%	Belanja Rutin

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi ketidakseimbangan yang sangat terlihat jelas antara Belanja Rutin (Operasional) dengan Belanja Pembangunan (Modal). Dalam tabel juga dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2012-2016 memprioritaskan Anggaran Belanjanya Kepada Belanja Rutin ketimbang Belanja Pembangunan. Rasio Aktivitas Belanja Rutin Paling tinggi terjadi di Tahun 2012 yaitu sebesar 81,5% dengan Rasio Belanja Pembangunan sebesar 18,4% . Rasio Belanja Rutin sudah tergolong baik karena hasil perhitungan menunjukkan hasil diatas 50% selama Tahun Anggaran 2012-2016, Hal ini berbanding terbalik dengan Rasio Belanja Pembangunan yang menunjukkan hasil perhitungan jauh dibawah 50% yang tergolong tidak baik.

b. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode sekarang ke periode berikutnya. Rasio ini dapat mengukur kinerja Pemerintah Kota Medan dalam hal Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut ini diuraikan perhitungan rasio pertumbuhan berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun dihitung} - \text{PAD Tahun Sebelumnya}}{\text{PAD Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun Dihitung} - \text{Pendapatan Tahun Sebelumnya}}{\text{Pendapatan Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Tahun Dihitung} - \text{Belanja Tahun Sebelumnya}}{\text{Belanja Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

Dengan kriteria sebagai berikut : 0% - 25% dikatakan Rendah

25% - 50% dikatakan Sedang

50% - 100% dikatakan Tinggi

Tabel 4.2

Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan

Tahun	Rasio Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan
--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Anggaran	PAD	Total Pendapatan	Belanja Daerah
2012	15,3%	9,1%	-0,6%
2013	5,0%	9,2%	6,7%
2014	14,7%	23,3%	15,4%
2015	7,6%	5,3%	17,4%
2016	3,0%	1,5%	3,4%

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 15,3% ke tahun 2013 sebesar 5,0% kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2014 yaitu sebesar 14,7%. Namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan kembali dan yang paling drastis adalah di tahun 2016 sebesar 3,0% . Hal tersebut tergolong tidak baik karena hasil perhitungan yang terus menurun dan semakin rendah. Dapat dilihat juga bahwa Rasio Total Pertumbuhan Pendapatan paling tinggi terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 23,3% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 9,1% dan tahun 2013 sebesar 9,2%, Namun terjadi penurunan kembali di tahun 2015 yaitu sebesar 5,3% dan makin menurun di tahun 2016 sebesar 1,5% yang merupakan hasil terendah dari perhitungan Rasio Total Pertumbuhan Pendapatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah paling baik terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 17,4% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebesar -0,6% kemudian tahun 2013 sebesar 6,7% dan tahun 2014 sebesar 15,4%. Tahun 2012 merupakan tahun dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah paling

rendah dari tahun tahun sesudahnya. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali yang cukup drastis yaitu sebesar 3,4% dan tergolong sangat rendah.

B. Pembahasan

1. Kinerja Pemerintah Kota Medan Setelah Dihitung Dengan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan yang dilakukan peneliti diatas dapat dilihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan belum tergolong baik dikarenakan ketidakmampuan mengontrol anggaran belanja yang keluar setiap tahunnya. Dapat dilihat juga terjadi defisit yang terus meningkat dan menandakan bahwa dari tahun 2015 hingga 2016 pendapatan yang diterima meningkat namun anggaran belanja yang dikeluarkan lebih boros dari tahun sebelumnya hal itu yang membuat kinerja pemerintah belum baik dalam mengontrol anggaran belanja setiap tahunnya.

2. Standar Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka dapat diketahui bahwa Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Dimana Rasio Aktivitas dalam hal belanja rutin sudah baik namun terus menurun dari tahun 2012 hingga 2016, berbeda dengan belanja pembangunan yang tidak memenuhi standar sehingga dapat

terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan pada pemerintah kota medan. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara realisasi yang telah ditentukan dengan anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah kota medan sehingga menyebabkan penurunan kinerja pemerintah kota medan.

- b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal yang sama terjadi pada Rasio Total Pendapatan dapat dilihat juga mengalami penurunan terus menerus dan belum memenuhi standar. Pada Rasio Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan terlihat bahwa yang memiliki hasil perhitungan paling baik adalah di tahun 2014 dan semakin menurun ditahun-tahun berikutnya. Rasio Belanja Daerah pada tahun 2012 menunjukkan hasil yang sangat tidak baik yaitu sebesar -0,06% kemudian semakin meningkat di tahun berikutnya dan kembali menurun di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima tidak mengalami peningkatan yang signifikan sementara anggaran yang dikeluarkan untuk belanja rutin terus meningkat sedangkan menurut teori Halim (2004) bahwa keseimbangan antara pendapatan yang diterima dengan

anggaran belanja yang dikeluarkan akan menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik.

3. Cara Meningkatkan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Kota Medan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan, Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Rasio Pertumbuhan dan Rasio Aktivitas adalah :

- a. Pemerintah Daerah menekan Anggaran Belanja sehingga sesuai atau mendekati dengan realisasi yang telah di tentukan agar dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan yaitu surplus dimana pemerintah memiliki selisih antara pendapatan yang diterima dengan belanja yang dikeluarkan setiap tahunnya. Hal ini juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja daerahnya.
- b. Pemerintah Daerah mengelola dan berusaha mempertahankan Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Lain-lain sebaik mungkin sesuai atau melebihi realisasi yang telah ditetapkan, Pendapatan yang diterima dapat juga berasal dari Pajak dan Retribusi. Hal tersebut akan berdampak pada kinerja pemerintah kota medan dalam mempertahankan dan memperoleh pendapatannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan yang dilakukan dapat dilihat kinerja pemerintah tergolong masih belum baik karena belum bisa mengontrol pemborosan anggaran belanja yang keluar setiap tahunnya dan menyebabkan terjadi defisit selama dua tahun belakangan.
2. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Medan memprioritaskan anggaran belanja yang dikeluarkan kepada belanja rutin setiap tahunnya. Anggaran belanja yang meningkat dan melebihi realisasi yang telah ditentukan berdampak pada ketidaksesuaian antara anggaran belanja yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan dengan Pendapatan yang diterima. Oleh karena itu Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih dibawah kriteria yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan perhitungan menggunakan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerahnya belum baik terlihat dari hasil perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan yang masih dibawah standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Medan belum dapat mempertahankan ataupun meningkatkan pendapatan yang

diterimanya setiap tahun dan dapat dilihat juga dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang defisit dalam beberapa tahun sehingga pemerintah belum menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang bagus dan aktivitas pengelolaan anggaran belanja yang baik.

B. Saran

1. Diharapkan selanjutnya Pemerintah Kota Medan dapat mengontrol anggaran belanja yang dikeluarkan setiap tahunnya dan mengurangi pemborosan pada belanja rutin agar lebih mendekati dengan realisasi yang telah ditetapkan yang dapat meningkatkan rasio aktivitas di masa yang akan datang. Serta diharapkan pemerintah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang akan meningkatkan rasio pertumbuhan sehingga tidak terjadi defisit di tahu-tahun berikutnya
2. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan di tahun berikutnya dengan menggunakan rasio keuangan lainnya seperti Rasio Kemandirian, Rasio Ekonomi, Rasio Efektivitas dan Efisiensi serta metode *Value For Money* agar dapat mengetahui kemandirian dan efektivitas dari kinerja Pemerintah Kota Medan di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bahtiar, Muchlis, Iskandar (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Muhyarsyah, Arfan Ikhsan (2014). *Metode Penelitian*. Cipta Pustaka: Bandung.
- Halim Abdul (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta .
- Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi Sondi, Rahmawati, Maulidah(2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta
- Mahmudi (2012). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
- Aditya Maulana Putra (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma.
- Bulan Susanti (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2003-2007*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Muhammad Saputra (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Negara, Bali.
- Sagay Arsajaya (2013). *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2009-2011*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Global Amurang.
- Adisasmita, Rahardjo (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Edisi 4. Jakarta.
- Astuti, Weni (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Rokan Hulu*. Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, Riau.
- Bastian Indra (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Yogyakarta.
- Jusnawati (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi PAD*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ahmad Syahrial (2016). “Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. <http://syahralahmad.blogspot.co.id/2016/06/analisis-rasio-untuk-mengukur-kinerja.html> Diakses 28 Februari 2018.

Darman Syarif (2015). “Keuangan Daerah”. Diakses 28 Februari 2018.
<http://theorykeuangaeraah.blogspot.co.id/2015/12/kinerja-keuangan-daerah.html>

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.